

PENGARUH *BLUE ACCOUNTING*, *ENVIRONMENTAL AWARENESS* DAN *STAKEHOLDER ENGAGEMENT* TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERKELANJUTAN BANGKA TENGAH

Wenni Anggita^{1*}; Firman Rahmadoni²

Universitas Bangka Belitung, Bangka^{1*}; Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka, Bangka²

Email : enghietha@gmail.com^{1*}; Fdoni4032@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 300 responden yang terdiri atas masyarakat pesisir dan stakeholder terkait pengelolaan sumber daya laut. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* untuk menguji hubungan antarvariabel dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Blue Accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan, dengan koefisien sebesar 0,286 dan *p-value* 0,000. *Environmental Awareness* juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien sebesar 0,318 dan *p-value* 0,000. Selanjutnya, *Stakeholder Engagement* berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,391 dan *p-value* 0,000. Di antara ketiga variabel tersebut, *Stakeholder Engagement* memiliki pengaruh paling kuat terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Nilai R^2 sebesar 0,672 menunjukkan bahwa *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,2% variasi pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut membutuhkan integrasi informasi ekonomi-ekologi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan aktif berbagai stakeholder. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dan stakeholder pesisir untuk memperkuat tata kelola kolaboratif dan pengambilan keputusan berbasis informasi ekonomi dan ekologis dalam mendukung keberlanjutan kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah.

Kata Kunci : *Blue Accounting*; *Environmental Awareness*; *Stakeholder Engagement*; Sumber Daya Laut; Keberlanjutan

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Blue Accounting, Environmental Awareness, and Stakeholder Engagement on Sustainable Marine Resource Management in the coastal area of Central Bangka Regency, Indonesia. This study employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires from 300 respondents, consisting of coastal communities and stakeholders involved in marine resource management. Respondents were selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the relationships among the variables and test the proposed hypotheses. The results indicate that Blue Accounting has a positive and significant effect on Sustainable Marine Resource Management, with a coefficient of 0.286 and a p-value of 0.000. Environmental Awareness also has a positive and significant effect, with a coefficient of 0.318 and a p-value of 0.000. Furthermore, Stakeholder Engagement has a positive and significant effect, with a coefficient of 0.391 and a p-value of 0.000. Among the three independent variables, Stakeholder Engagement has the strongest effect on sustainable marine resource management. The R^2 value of 0.672 indicates that Blue Accounting, Environmental Awareness, and Stakeholder Engagement jointly explain 67.2% of the variance in sustainable marine resource management. These findings demonstrate that sustainable

marine resource management requires the integration of economic and ecological information, increased environmental awareness, and active stakeholder participation. The study provides practical implications for local governments and coastal stakeholders to strengthen collaborative governance and promote economic- and ecological-based decision-making to support the sustainability of coastal resources in Central Bangka Regency.

Keywords : Blue Accounting; Environmental Awareness; Stakeholder Engagement; Marine Resources; Sustainability

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat, perekonomian daerah, dan keberlanjutan ekosistem. Sumber daya laut menyediakan berbagai manfaat ekonomi melalui kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Pada saat yang sama, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi wilayah pesisir, menyediakan habitat bagi biota laut, serta menyerap dan menyimpan karbon. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya laut memiliki keterkaitan erat antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki potensi sumber daya laut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang cukup besar. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut menjadikan keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai faktor penting bagi keberlangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya laut juga menghadapi berbagai tekanan, seperti eksploitasi sumber daya, degradasi ekosistem, pencemaran, perubahan kualitas lingkungan, serta tekanan terhadap produktivitas sumber daya perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kemampuan ekosistem dalam menyediakan sumber daya secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut adalah *Blue Accounting*. *Blue Accounting* merupakan pendekatan yang mengintegrasikan informasi ekonomi dan ekologis berkaitan dengan sumber daya dan ekosistem laut. Pendekatan ini memungkinkan nilai ekonomi sumber daya laut, jasa ekosistem, kondisi lingkungan, dan biaya ekologis dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan konsep *marine ecosystem accounting* dan *natural capital accounting* menunjukkan semakin pentingnya penyediaan informasi mengenai kondisi ekosistem dan jasa yang diberikan kepada masyarakat serta perekonomian (Schaefer *et al.*, 2015; United Nations *et al.*, 2021). Dalam konteks kawasan pesisir, penerapan *Blue Accounting* diharapkan dapat membantu stakeholder memahami konsekuensi ekonomi dan ekologis dari pemanfaatan sumber daya laut.

Selain ketersediaan informasi akuntansi, keberhasilan pengelolaan sumber daya laut juga dipengaruhi oleh *environmental awareness* masyarakat dan stakeholder. Kesadaran lingkungan mencerminkan pemahaman dan kepedulian individu terhadap kondisi lingkungan serta kesediaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perilakunya. Masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan lebih tinggi cenderung memahami pentingnya menjaga ekosistem dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam konteks masyarakat pesisir, *environmental awareness* menjadi penting karena kehidupan dan aktivitas ekonomi mereka memiliki hubungan langsung dengan kondisi sumber daya laut. Faktor lain yang penting adalah *stakeholder engagement*. Pengelolaan sumber daya laut melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha, kelompok masyarakat, hingga organisasi lingkungan. Bennett *et al.* (2019) menekankan bahwa pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan membutuhkan perhatian terhadap aspek sosial, keadilan, dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan stakeholder memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif serta meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan mengenai pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan tidak hanya membutuhkan instrumen informasi, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif stakeholder.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan ekologis memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Costanza *et al.* (2014) menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekosistem dapat memengaruhi nilai jasa ekosistem yang diterima masyarakat. Barbier *et al.* (2011) juga menunjukkan pentingnya jasa ekosistem pesisir dalam menyediakan berbagai manfaat ekonomi. Sementara itu, penelitian mengenai *blue economy* menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan kepentingan masyarakat (Bennett *et al.*, 2019; Jouffray *et al.*, 2020). Namun, penelitian yang secara simultan menguji pengaruh *Blue Accounting*, *environmental awareness*, dan *stakeholder engagement* terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, khususnya pada konteks masyarakat pesisir tingkat daerah, masih terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap*. Penelitian mengenai Blue Accounting lebih banyak berkembang dalam diskursus *marine ecosystem accounting*, *natural capital accounting*, dan *environmental-economic accounting*, sementara penelitian *environmental awareness* lebih banyak mengkaji perilaku prolingkungan. Di sisi lain, *stakeholder engagement* umumnya dikaji dalam konteks tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut masih jarang ditempatkan dalam satu model empiris untuk menjelaskan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Padahal, keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut membutuhkan kombinasi antara informasi yang memadai,

kesadaran lingkungan, dan keterlibatan stakeholder. Berdasarkan perspektif *Stakeholder Theory*, pengelolaan sumber daya laut perlu mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang bergantung dan terdampak oleh pemanfaatan sumber daya tersebut. *Blue Accounting* dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan stakeholder, *environmental awareness* dapat membentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, sedangkan *stakeholder engagement* memungkinkan berbagai pihak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga faktor tersebut secara teoritis dapat mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah karena karakteristik wilayah pesisir dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut membutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek. Pengelolaan yang berkelanjutan membutuhkan informasi mengenai kondisi dan nilai sumber daya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta keterlibatan stakeholder dalam proses pengelolaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *pengaruh Blue Accounting, environmental awareness, dan stakeholder engagement* terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian *environmental accounting* dan *blue economy*, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya laut yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi atau aktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kepentingan satu kelompok tertentu, tetapi juga oleh kemampuannya mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas tersebut. Dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, perspektif ini menjadi relevan karena sumber daya pesisir memiliki karakteristik sebagai sumber daya bersama yang melibatkan pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha, kelompok masyarakat, akademisi, serta organisasi lingkungan. Setiap kelompok dapat memiliki kepentingan yang berbeda terhadap pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut.

Literatur mengenai pengelolaan sumber daya alam menunjukkan kecenderungan yang sama mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi memberikan

penekanan yang berbeda terhadap mekanisme yang diperlukan. Bennett *et al.* (2019), misalnya, menekankan bahwa pengembangan *blue economy* tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan aspek keadilan, inklusivitas, dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Sementara itu, pendekatan *ecosystem accounting* lebih menekankan pentingnya ketersediaan informasi mengenai kondisi dan jasa ekosistem sebagai dasar pengambilan keputusan (Schaefer *et al.*, 2015; United Nations *et al.*, 2021). Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya laut membutuhkan setidaknya dua aspek yang saling melengkapi, yaitu informasi ekonomi-ekologi yang memadai dan keterlibatan pihak yang menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, keterlibatan banyak stakeholder tidak selalu menghasilkan pengelolaan yang berkelanjutan. Perbedaan kepentingan, ketimpangan akses terhadap informasi, serta dominasi kelompok tertentu dapat menyebabkan keputusan pengelolaan lebih menekankan manfaat ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks tersebut, *Stakeholder Theory* dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menjelaskan siapa yang berkepentingan terhadap sumber daya laut, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana informasi melalui *Blue Accounting*, kesadaran lingkungan, dan keterlibatan stakeholder dapat membentuk pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan.

Blue Accounting

Blue Accounting merupakan pendekatan yang berkaitan dengan pengukuran, pencatatan, dan penyediaan informasi mengenai sumber daya laut, kondisi ekosistem pesisir, jasa ekosistem, serta manfaat ekonomi dan ekologis yang dihasilkan. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan *natural capital accounting*, *environmental-economic accounting*, dan *marine ecosystem accounting*. Meskipun memiliki orientasi yang serupa, literatur menunjukkan perbedaan dalam fokus pengembangan pendekatan tersebut.

Schaefer *et al.* (2015) menekankan perlunya *marine ecosystem accounting* sebagai instrumen operasional yang mampu menerjemahkan kondisi ekosistem laut menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Sementara itu, *System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting* (SEEA EA) memberikan pendekatan yang lebih sistematis dengan menghubungkan aset ekosistem, kondisi ekosistem, aliran jasa ekosistem, dan manfaatnya bagi masyarakat serta aktivitas ekonomi (United Nations *et al.*, 2021). Kedua pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam mengkritisi keterbatasan pengukuran ekonomi konvensional yang belum sepenuhnya mengakui kontribusi maupun penurunan kualitas modal alam.

Meskipun demikian, perkembangan *ecosystem accounting* masih lebih banyak berorientasi pada pembentukan kerangka pengukuran dan penyediaan informasi dibandingkan pengujian terhadap konsekuensi informasi tersebut pada tingkat masyarakat atau pengelolaan lokal. Dengan kata lain, kemampuan sistem akuntansi untuk mengukur kondisi ekosistem tidak secara otomatis menunjukkan bahwa informasi tersebut benar-benar digunakan untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Kesenjangan antara *information availability* dan *information utilization* menjadi persoalan penting yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memandang *Blue Accounting* tidak sebatas proses valuasi ekonomi sumber daya laut, tetapi sebagai ketersediaan dan pemanfaatan informasi ekonomi-ekologi yang meliputi nilai sumber daya, kondisi ekosistem, jasa ekosistem, biaya atau dampak lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menguji apakah keberadaan informasi ekonomi-ekologi benar-benar berkaitan dengan praktik pengelolaan sumber daya laut pada tingkat stakeholder.

Environmental Awareness

Environmental awareness menggambarkan kesadaran mengenai kondisi lingkungan, konsekuensi aktivitas manusia terhadap ekosistem, serta pentingnya tindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Literatur pada umumnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepedulian lingkungan merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku pro-lingkungan. Namun, hubungan antara kesadaran dan tindakan tidak selalu bersifat langsung.

Pada satu sisi, semakin tinggi pemahaman individu terhadap konsekuensi ekologis suatu aktivitas, semakin besar kemungkinan munculnya dukungan terhadap tindakan konservasi dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam masyarakat pesisir, hubungan tersebut menjadi penting karena keberlanjutan pendapatan masyarakat sangat bergantung pada kondisi sumber daya laut. Kesadaran terhadap pencemaran, kerusakan mangrove, degradasi terumbu karang, penurunan kualitas perairan, dan eksploitasi berlebihan secara teoritis dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

Pada sisi lain, kesadaran lingkungan belum tentu diterjemahkan menjadi perilaku yang berkelanjutan. Tekanan ekonomi, ketergantungan terhadap sumber daya alam, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta lemahnya dukungan kelembagaan dapat menciptakan kesenjangan antara apa yang diketahui masyarakat dengan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, tingginya *environmental awareness* tidak dapat diasumsikan secara otomatis menghasilkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Perdebatan tersebut memperlihatkan perlunya pengujian *environmental awareness* dalam konteks masyarakat pesisir secara langsung. Penelitian ini memposisikan kesadaran lingkungan sebagai kapasitas kognitif dan afektif

stakeholder dalam memahami konsekuensi ekologis pemanfaatan sumber daya laut yang selanjutnya berpotensi memengaruhi praktik pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

Stakeholder Engagement

Stakeholder engagement merupakan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan pesisir, keterlibatan tersebut dapat mencakup pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha, kelompok masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan. Sebagian literatur menempatkan keterlibatan stakeholder sebagai elemen penting dalam keberlanjutan karena memungkinkan pertukaran informasi, integrasi pengetahuan lokal, peningkatan legitimasi keputusan, serta pembentukan tanggung jawab bersama. Bennett *et al.* (2019) menunjukkan pentingnya dimensi sosial, keadilan, dan inklusivitas dalam pembangunan ekonomi biru. Perspektif tersebut menantang pendekatan *blue economy* yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat dan konsekuensinya terhadap masyarakat lokal.

Namun demikian, keberadaan stakeholder dalam suatu forum tidak selalu identik dengan keterlibatan yang substantif. Partisipasi dapat bersifat formalitas apabila masyarakat hanya dilibatkan pada tahap konsultasi tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan. Selain itu, ketimpangan kekuasaan dan akses informasi dapat menyebabkan kepentingan kelompok tertentu lebih dominan dibandingkan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, literatur mengenai stakeholder menunjukkan adanya perbedaan penting antara *stakeholder participation* sebagai kehadiran dan *stakeholder engagement* sebagai keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan pengertian kedua dengan memandang *stakeholder engagement* melalui keterlibatan dalam penyampaian aspirasi, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar menilai apakah stakeholder hadir dalam proses pengelolaan, tetapi sejauh mana mereka benar-benar terlibat di dalamnya.

Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan merupakan proses pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Perspektif *blue economy* menekankan bahwa sumber daya laut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi pemanfaatannya harus tetap mempertahankan kesehatan ekosistem laut (World Bank, 2017). Meskipun terdapat kesepakatan mengenai pentingnya keseimbangan tersebut, literatur menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan ekonomi dan ekologis. Pemanfaatan sumber daya yang meningkatkan pendapatan dalam

jangka pendek dapat meningkatkan tekanan terhadap ekosistem apabila tidak disertai batas pemanfaatan yang sesuai. Sebaliknya, kebijakan konservasi yang terlalu membatasi akses masyarakat tanpa mempertimbangkan ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan rendahnya penerimaan terhadap kebijakan.

Bennett *et al.* (2019) memperluas diskusi tersebut dengan menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi biru juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dalam penelitian ini tidak didefinisikan hanya berdasarkan kondisi ekologis, tetapi mencakup tiga dimensi yang saling berhubungan: keberlanjutan ekonomi, perlindungan ekologis, dan keberlanjutan sosial.

Sintesis Literatur dan Research Gap

Sintesis literatur menunjukkan adanya kesepakatan bahwa keberlanjutan sumber daya laut membutuhkan integrasi antara informasi mengenai kondisi sumber daya, kesadaran terhadap konsekuensi ekologis, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Namun, ketiga aspek tersebut cenderung berkembang dalam aliran literatur yang berbeda. Literatur *marine ecosystem accounting* dan SEEA EA lebih banyak menekankan pengukuran dan penyediaan informasi ekonomi-ekologi (Schaefer *et al.*, 2015; United Nations *et al.*, 2021), sedangkan literatur *blue economy* dan tata kelola kelautan lebih banyak menekankan partisipasi, keadilan, dan keterlibatan stakeholder (World Bank, 2017; Bennett *et al.*, 2019). Sementara itu, kesadaran lingkungan lebih sering dibahas pada tingkat perilaku individu dibandingkan diintegrasikan dengan sistem informasi ekonomi-ekologi dalam konteks pengelolaan sumber daya laut.

Kondisi tersebut menunjukkan tiga kesenjangan. Pertama, masih terdapat *gap* konseptual karena informasi ekonomi-ekologi, kesadaran lingkungan, dan keterlibatan stakeholder lebih sering dibahas secara terpisah. Kedua, terdapat *gap* empiris karena keberadaan sistem *ecosystem accounting* belum dengan sendirinya membuktikan bahwa informasi tersebut berhubungan dengan praktik pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan pada tingkat stakeholder. Ketiga, terdapat *gap* kontekstual, khususnya mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut bekerja dalam masyarakat pesisir Indonesia yang memiliki ketergantungan ekonomi relatif tinggi terhadap sumber daya laut.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* dalam satu model empiris untuk menjelaskan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Berlandaskan *Stakeholder Theory*, penelitian ini berargumen bahwa keberlanjutan sumber daya laut tidak hanya membutuhkan informasi ekonomi-ekologi yang memadai, tetapi juga stakeholder yang memiliki kesadaran terhadap konsekuensi ekologis dan keterlibatan yang substantif dalam proses pengelolaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan *Blue Accounting* dari sekadar

persoalan bagaimana sumber daya laut diukur dan dinilai menuju persoalan yang lebih substantif, yaitu apakah informasi tersebut, bersama dengan kapasitas dan keterlibatan stakeholder, berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Pengaruh *Blue Accounting* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Blue Accounting menyediakan informasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis sumber daya laut. Informasi tersebut dapat membantu stakeholder memahami nilai sumber daya, kondisi ekosistem, jasa ekosistem, serta dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas ekonomi. Berdasarkan Stakeholder Theory, informasi yang relevan dan transparan dapat membantu stakeholder dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sumber daya laut, informasi mengenai kondisi ekonomi dan ekologis dapat mendorong keputusan yang lebih mempertimbangkan keberlanjutan dibandingkan keputusan yang hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek. Schaefer *et al.* (2015) menunjukkan pentingnya *marine ecosystem accounting* dalam menyediakan informasi mengenai kondisi ekosistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, SEEA EA (United Nations *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa informasi mengenai kondisi ekosistem dan jasa ekosistem dapat diintegrasikan dengan informasi ekonomi. Dengan demikian, semakin baik penerapan *Blue Accounting*, semakin besar kemampuan stakeholder dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya laut.

H1: *Blue Accounting* berpengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

Pengaruh *Environmental Awareness* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Environmental awareness mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami permasalahan lingkungan dan menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Kesadaran tersebut dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam konteks masyarakat pesisir, ketergantungan terhadap sumber daya laut menjadikan *environmental awareness* sebagai faktor penting dalam menentukan perilaku pemanfaatan sumber daya. Masyarakat yang memahami dampak pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan degradasi ekosistem akan lebih terdorong untuk menerapkan perilaku yang mendukung keberlanjutan. *Environmental awareness* juga dapat meningkatkan penerimaan terhadap program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran lingkungan masyarakat dan stakeholder, semakin besar kemungkinan terciptanya praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

H2: *Environmental Awareness* berpengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

Pengaruh *Stakeholder Engagement* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya laut melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pemerintah berkepentingan terhadap tata kelola dan pembangunan daerah, nelayan bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan pelaku usaha memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan ekonomi sumber daya. *Stakeholder engagement* memungkinkan kepentingan tersebut dikomunikasikan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan stakeholder juga memungkinkan penggunaan pengetahuan lokal masyarakat pesisir yang sering kali tidak tersedia dalam data formal pemerintah. Bennett *et al.* (2019) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi biru perlu memperhatikan aspek inklusivitas dan keadilan. Dengan demikian, keterlibatan stakeholder dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, mengurangi konflik kepentingan, serta meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga sumber daya laut. Berdasarkan argumentasi tersebut:

H3: *Stakeholder Engagement* berpengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*. Desain penelitian digunakan untuk menguji pengaruh *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan antarvariabel berdasarkan hipotesis yang dikembangkan dari *Stakeholder Theory*, *Natural Capital Accounting*, dan konsep *Blue Economy*. Penelitian dilakukan secara *cross-sectional*, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode penelitian. Unit analisis penelitian adalah individu yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Model penelitian terdiri atas tiga variabel independen, yaitu *Blue Accounting* (X_1), *Environmental Awareness* (X_2), dan *Stakeholder Engagement* (X_3), serta satu variabel dependen, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan (Y).

Subjek, Objek, dan Sampel Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat dan stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Subjek penelitian meliputi nelayan, masyarakat pesisir, kelompok nelayan, pelaku usaha yang berkaitan dengan sumber daya pesisir, serta pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumber daya laut. Objek penelitian adalah pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan serta faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhinya, yaitu *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement*. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) responden berusia minimal 18 tahun; (2) berdomisili atau melakukan aktivitas di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah; (3) memiliki keterkaitan atau ketergantungan terhadap sumber daya laut; (4) mengetahui atau pernah terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumber daya laut; dan (5) bersedia menjadi responden penelitian.

Jumlah sampel sebanyak 300 responden yang dipertimbangkan secara memadai untuk analisis menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), sekaligus memungkinkan keterwakilan responden dari beberapa kelompok masyarakat pesisir dan stakeholder yang relevan.

Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Penelitian menggunakan empat variabel, yaitu *Blue Accounting* (X_1), *Environmental Awareness* (X_2), *Stakeholder Engagement* (X^3), dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan (Y). Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju.

***Blue Accounting* (X_1)**

Blue Accounting didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan dan pemanfaatan informasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis sumber daya laut dalam mendukung pengambilan keputusan. Konstruk ini mencerminkan sejauh mana informasi mengenai sumber daya laut tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekosistem dan dampak lingkungan. *Blue Accounting* diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) informasi nilai ekonomi sumber daya laut; (2) informasi kondisi ekosistem pesisir; (3) informasi jasa ekosistem; (4) informasi mengenai dampak atau biaya lingkungan; (5) informasi mengenai perubahan kondisi sumber daya laut; dan (6) informasi mengenai keberlanjutan sumber daya laut.

***Environmental Awareness* (X_2)**

Environmental Awareness merupakan tingkat pengetahuan, kepedulian, dan kesadaran individu terhadap kondisi lingkungan serta pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut

dan ekosistem pesisir. *Environmental Awareness* diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) pengetahuan mengenai kondisi lingkungan pesisir; (2) kesadaran terhadap dampak aktivitas manusia terhadap laut; (3) kepedulian terhadap ekosistem pesisir; (4) kesadaran mengenai pentingnya menjaga sumber daya laut; (5) kesadaran terhadap pencemaran lingkungan; dan (6) komitmen terhadap perilaku yang ramah lingkungan.

Stakeholder Engagement (X₃)

Stakeholder Engagement merupakan tingkat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, komunikasi, dan evaluasi pengelolaan sumber daya laut. *Stakeholder Engagement* diukur melalui enam indikator, yaitu: (1) keterlibatan stakeholder dalam perencanaan; (2) keterlibatan dalam pengambilan keputusan; (3) komunikasi antar-stakeholder; (4) pertukaran informasi; (5) kolaborasi antar-stakeholder; dan (6) keterlibatan stakeholder dalam evaluasi pengelolaan sumber daya laut.

Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan (Y)

Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan merupakan kemampuan pengelolaan sumber daya laut dalam menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis serta ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Variabel ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keberlanjutan sosial. Indikatornya meliputi: (1) keberlanjutan sumber daya laut; (2) keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir; (3) kelestarian ekosistem; (4) pengendalian pencemaran; (5) pemanfaatan sumber daya sesuai daya dukung lingkungan; (6) pemerataan manfaat sumber daya laut; (7) partisipasi masyarakat; dan (8) orientasi pengelolaan jangka panjang.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, serta publikasi ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator setiap variabel. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Sebelum digunakan dalam survei utama, instrumen terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi kejelasan pernyataan, validitas awal, dan reliabilitas instrumen. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar penyempurnaan kuesioner sebelum pengumpulan data utama.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. PLS-SEM dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan prediktif antara beberapa konstruk laten dan memungkinkan pengujian model dengan indikator yang relatif kompleks. Analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran (*measurement model*) dan pengujian model struktural (*structural model*). Pada tahap *measurement model*, pengujian dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dievaluasi melalui nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai *outer loading* yang ideal adalah $\geq 0,70$ dan nilai AVE $\geq 0,50$. Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* dengan nilai yang diharapkan $\geq 0,70$.

Validitas diskriminan diuji menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) dan Fornell-Larcker Criterion. Nilai HTMT digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk secara empiris berbeda dari konstruk lainnya. Pada tahap *structural model*, pengujian dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF), koefisien determinasi (R^2), effect size (f^2), predictive relevance (Q^2), dan koefisien jalur (*path coefficient*). Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan f^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping pada PLS-SEM. Pengujian digunakan untuk mengetahui arah, besarnya pengaruh, dan tingkat signifikansi hubungan antarvariabel. Hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai *p-value* $< 0,05$ atau nilai *t-statistic* $> 1,96$ pada tingkat signifikansi 5 persen. Hubungan positif ditunjukkan melalui nilai koefisien jalur yang positif. Model struktural penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

X_1 = Blue Accounting

X_2 = Environmental Awareness

X_3 = Stakeholder Engagement

β_0 = konstanta

β_1 – β_3 = koefisien jalur

ε = error

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 300 responden yang merupakan masyarakat dan stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan

pesisir Kabupaten Bangka Tengah. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya laut. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 217 orang atau 72,3%, sedangkan responden perempuan sebanyak 83 orang atau 27,7%. Berdasarkan usia, kelompok responden terbesar berada pada rentang usia 41–50 tahun sebanyak 91 orang atau 30,3%, diikuti kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 86 orang atau 28,7%. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 116 orang atau 38,7%. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, nelayan merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 158 responden atau 52,7%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut sehingga dinilai relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum jawaban responden terhadap variabel *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, *Stakeholder Engagement*, dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel 2. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 3,50. *Environmental Awareness* memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,12, yang menunjukkan bahwa responden relatif memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Sementara itu, *Stakeholder Engagement* memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya laut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Pengujian Model Pengukuran

Pengujian model pengukuran (*measurement model*) dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator yang digunakan dalam penelitian. Pengujian meliputi *outer loading*, *convergent validity*, *composite reliability*, *Cronbach's Alpha*, dan *Average Variance Extracted* (AVE) dapat dilihat pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang baik dalam merefleksikan konstruk yang diukur sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen.

Uji Reliabilitas dan Validitas Konstruk

Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, sedangkan validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70. Sementara itu, konstruk dinyatakan memenuhi

validitas konvergen apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hasil pengujian reliabilitas dan validitas konstruk dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70. Nilai AVE seluruh konstruk juga berada di atas 0,50. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen.

Uji Validitas Diskriminan dan Multikolinearitas

Validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing konstruk dalam penelitian memiliki karakteristik yang berbeda secara empiris. Pengujian dilakukan menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, Nilai HTMT seluruh pasangan konstruk berada di bawah 0,90. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan dan dapat dibedakan secara empiris.

Selanjutnya dilakukan pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang disajikan pada tabel 6 yang terlihat bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah 5,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antarvariabel independen dalam model penelitian

Pengujian Model Struktural

Pengujian model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Evaluasi dilakukan melalui nilai R^2 , f^2 , Q^2 , dan koefisien jalur yang disajikan pada tabel 7.

Pada tabel 7, terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,672 menunjukkan bahwa *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,2% variasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. Sementara itu, sebesar 32,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Tabel 8 hasil Uji Effect Size menyajikan hasil yang menunjukkan bahwa *Stakeholder Engagement* memberikan kontribusi relatif paling besar terhadap variabel Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan dibandingkan dua variabel independen lainnya. Nilai predictive relevance (Q^2) untuk variabel Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan sebesar 0,461, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan tingkat signifikansi 5% yang disajikan pada tabel 9. Dari tabel 9, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Stakeholder Engagement* menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien sebesar 0,391, diikuti *Environmental Awareness* sebesar

0,318 dan *Blue Accounting* sebesar 0,286. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya informasi ekonomi dan ekologis, tetapi juga oleh tingkat kesadaran lingkungan dan keterlibatan aktif berbagai stakeholder dalam proses pengelolaan kawasan pesisir.

Pembahasan

Pengaruh *Blue Accounting* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Blue Accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan dengan nilai koefisien sebesar 0,286, t-statistic sebesar 4,217, dan p-value sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan penerapan *Blue Accounting* diikuti oleh peningkatan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi sumber daya laut, kondisi ekosistem, jasa ekosistem, serta dampak lingkungan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Stakeholder Theory* sebagai grand theory penelitian. Freeman *et al.* (2010) menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi atau aktivitas pengelolaan sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan untuk memenuhi kepentingan berbagai stakeholder. Dalam konteks kawasan pesisir, stakeholder meliputi pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan. Masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya laut. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat ekonomi sekaligus kondisi ekologis sumber daya tersebut.

Dalam perspektif Stakeholder Theory, *Blue Accounting* dapat dipandang sebagai mekanisme penyediaan informasi kepada stakeholder. Informasi mengenai nilai sumber daya laut, jasa ekosistem, biaya kerusakan lingkungan, serta perubahan kondisi ekosistem memungkinkan stakeholder memperoleh dasar informasi yang lebih lengkap dalam mengevaluasi konsekuensi ekonomi dan ekologis suatu aktivitas. Dengan demikian, keputusan pengelolaan tidak hanya didasarkan pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang menjadi kepentingan bersama.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan perkembangan konsep *Natural Capital Accounting* dan *Ecosystem Accounting*. Schaefer *et al.* (2015) menunjukkan bahwa *marine ecosystem accounting* dapat menjadi instrumen untuk menyediakan informasi mengenai kondisi ekosistem laut dan perubahan ekosistem yang relevan bagi pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut penting karena ekosistem laut menghasilkan berbagai jasa yang memiliki nilai ekonomi

dan sosial, tetapi sering kali tidak tercermin dalam sistem akuntansi ekonomi konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, United Nations *et al.* (2021) melalui *System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA)* menempatkan ekosistem sebagai bagian dari sistem informasi ekonomi dan lingkungan. SEEA EA memungkinkan informasi mengenai kondisi ekosistem, jasa ekosistem, dan manfaat yang diterima masyarakat dihubungkan dengan aktivitas ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut memperkuat argumentasi bahwa *Blue Accounting* dapat menjadi dasar informasi untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya laut.

Hasil penelitian juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Bennett *et al.* (2019) mengenai *blue growth* dan *blue economy*. Mereka menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek sosial dan ekologis serta tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi. Informasi yang mampu memperlihatkan hubungan antara manfaat ekonomi dan kondisi ekosistem menjadi penting agar kebijakan ekonomi biru tidak menghasilkan trade-off ekologis yang merugikan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

Selanjutnya, Obura *et al.* (2021) menekankan pentingnya pengintegrasian informasi mengenai kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut relevan dengan *Blue Accounting* karena keberlanjutan sumber daya laut tidak dapat dilepaskan dari kesehatan ekosistem yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang penting. Kawasan pesisir tidak hanya memiliki nilai ekonomi melalui aktivitas perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga memiliki nilai ekologis melalui ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan jasa perlindungan pesisir. Apabila nilai ekologis tersebut tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, terdapat risiko bahwa pemanfaatan sumber daya laut lebih berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek dan mengabaikan biaya ekologis jangka panjang.

Pengaruh *Environmental Awareness* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Environmental Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan, dengan nilai koefisien sebesar 0,318, *t-statistic* sebesar 4,856, dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran lingkungan masyarakat dan stakeholder, semakin baik pula pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Dengan demikian, H2 diterima.

Temuan ini mendukung *Stakeholder Theory* sebagai grand theory penelitian yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai pihak dalam menjaga

keberlanjutan sumber daya (Freeman *et al.*, 2010). Dalam konteks pesisir, masyarakat merupakan stakeholder utama yang berinteraksi langsung dengan sumber daya laut. Kesadaran terhadap kondisi lingkungan mendorong masyarakat memahami bahwa sumber daya laut merupakan *natural capital* yang harus dijaga agar tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui *Value-Belief-Norm (VBN) Theory* (Stern, 2000), yang menjelaskan bahwa kesadaran mengenai konsekuensi kerusakan lingkungan dapat membentuk norma dan perilaku pro-lingkungan. Selain itu, *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa pemahaman dan sikap terhadap lingkungan dapat mendorong terbentuknya niat untuk melakukan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat yang memahami dampak pencemaran, penangkapan berlebihan, dan kerusakan ekosistem cenderung lebih mendukung praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan Kollmuss dan Agyeman (2002) yang menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan perilaku pro-lingkungan. Hasil ini juga relevan dengan Bennett *et al.* (2019) yang menekankan bahwa *blue economy* tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekologis dan sosial. Dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut menjadikan *Environmental Awareness* sebagai faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara kesehatan ekosistem dan keberlanjutan mata pencaharian dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Environmental Awareness* merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Peningkatan kesadaran melalui pendidikan lingkungan, penyuluhan masyarakat pesisir, dan penguatan pemahaman mengenai nilai ekologis sumber daya laut dapat menjadi strategi untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan pesisir Kabupaten Bangka Tengah.

Pengaruh *Stakeholder Engagement* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Stakeholder Engagement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan, dengan nilai koefisien sebesar 0,391, *t-statistic* sebesar 6,174, dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya laut, semakin baik pula tingkat keberlanjutan pengelolaannya. Dengan demikian, H3 diterima.

Temuan ini mendukung *Stakeholder Theory* sebagai grand theory penelitian yang menekankan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya membutuhkan keterlibatan dan perhatian terhadap kepentingan berbagai pihak (Freeman *et al.*, 2010). Dalam konteks kawasan pesisir, pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Keterlibatan mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Stakeholder Engagement juga memperkuat proses kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif. Ketika stakeholder terlibat dalam pertukaran informasi dan penyusunan keputusan, potensi konflik kepentingan dapat dikurangi dan rasa tanggung jawab bersama terhadap sumber daya laut dapat ditingkatkan. Hal ini penting karena sumber daya laut memiliki karakteristik sebagai sumber daya bersama yang membutuhkan koordinasi antar-pihak dalam pemanfaatan dan perlindungannya.

Temuan ini sejalan dengan Bennett *et al.* (2019) yang menekankan bahwa keberlanjutan *blue economy* membutuhkan pendekatan yang inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok yang terdampak dan berkepentingan terhadap sumber daya laut. Selain itu, United Nations (2021) melalui pendekatan *Sustainable Development Goal 14* menekankan pentingnya kemitraan, tata kelola, dan partisipasi berbagai pihak dalam mendukung konservasi serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan kondisi Kabupaten Bangka Tengah, di mana keberlanjutan sumber daya pesisir tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan nelayan dan masyarakat dalam pengawasan, konservasi, pemanfaatan sumber daya, serta penyampaian informasi mengenai perubahan kondisi lingkungan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir. Dengan koefisien sebesar 0,391, *Stakeholder Engagement* menjadi variabel dengan pengaruh paling kuat dalam model penelitian dibandingkan *Blue Accounting* dan *Environmental Awareness*. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya membutuhkan informasi dan kesadaran lingkungan, tetapi juga keterlibatan aktif stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, peningkatan forum komunikasi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir, pelibatan kelompok nelayan dalam perencanaan kebijakan, serta mekanisme partisipatif dalam pengawasan sumber daya laut dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat pengelolaan pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Blue Accounting*, *Environmental Awareness*, dan *Stakeholder Engagement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah. *Blue Accounting* memiliki koefisien sebesar 0,286, *Environmental Awareness* sebesar 0,318, dan *Stakeholder Engagement* sebesar 0,391. Seluruh hipotesis diterima dengan *p-value* 0,000. Nilai R^2 sebesar 0,672 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 67,2% variasi pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Temuan ini memperkuat *Stakeholder Theory* bahwa keberlanjutan membutuhkan integrasi informasi, kesadaran, dan keterlibatan berbagai stakeholder.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan *Blue Accounting* melalui integrasi informasi ekonomi dan ekologis dalam perencanaan kebijakan pesisir. Peningkatan *Environmental Awareness* dapat dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat pesisir. Sementara itu, tingginya pengaruh *Stakeholder Engagement* menunjukkan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, nelayan, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* dan data berbasis persepsi responden sehingga belum menggambarkan perubahan kondisi dalam jangka panjang serta masih berpotensi mengalami *self-report bias*. Selain itu, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen dan berfokus pada Kabupaten Bangka Tengah sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain masih terbatas.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain *longitudinal* dan *mixed methods* serta mengintegrasikan data persepsi dengan data ekologis dan ekonomi aktual. Penelitian mendatang juga dapat menambahkan variabel seperti *Environmental Governance*, *Community Participation*, *Institutional Capacity*, dan *Sustainable Livelihood*, serta melakukan perbandingan antarwilayah pesisir untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Penghargaan/Ucapan Terima Kasih (Optional)

Penulis Menyampaikan Terima Kasih Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan dengan surat tugas penelitian dan SK Mandiri Penelitian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, masyarakat dan stakeholder kawasan pesisir Kabupaten Bangka Tengah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kontribusi selama proses pelaksanaan penelitian ini. Selain itu juga mitra penulis Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka yang telah memberikan bantuan submit *fee jurnal*. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden yang telah

meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bennett, N. J., Katz, L., Yadao-Evans, W., Ahmadi, G. N., Atwood, T. B., Blythe, J., Claudet, J., de Vos, A., Fitzpatrick, J., Fulanda, B., Govan, H., Hattam, C., MacKeracher, T., Mangubhai, S., McField, M., Niner, H. J., Norström, A. V., Owusu, A., Peters, K., ... Sumaila, U. R. (2021). Advancing social equity in and through marine conservation. *Frontiers in Marine Science*, 8, 711538. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.711538>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>
- Blythe, J., Armitage, D., Bennett, N., Silver, J., & Villasante, S. (2021). The blue economy as a global project: Constructing, contesting, and consolidating in the 21st century. *Sustainability Science*, 16, 1085–1099. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00883-3>
- Burgess, M. G., Clemence, M., McDermott, G. R., Costello, C., & Gaines, S. D. (2018). Five rules for pragmatic blue growth. *Marine Policy*, 87, 331–339. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.026>
- Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S., & Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services*, 28, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008>
- Crona, B., Wassénius, E., Jonell, M., *et al.* (2021). Four ways to make more sustainable use of marine resources. *Ambio*, 50, 1451–1466. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01456-8>
- Farmery, A. K., O'Neill, A., Allison, E. H., Andrew, N. L., & Pecl, G. T. (2021). Global food security and food systems: Marine fisheries and aquaculture. *Frontiers in Marine Science*, 8, 700479. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.700479>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768>
- Gissi, E., Manea, E., Mazari, A. D., Fraschetti, S., Almpandou, V., Bevilacqua, S., Coll, M., Guarnieri, G., Lloret-Lloret, E., Pascual, M., & others. (2021). A review of the combined effects of climate change and other human pressures on marine ecosystems. *Global Change Biology*, 27(20), 5024–5041. <https://doi.org/10.1111/gcb.15830>
- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>
- Lubchenco, J., & Haugan, P. M. (2023). The ocean as a solution to climate change and sustainable development. *Oceanography*, 36(2), 8–15.
- Obura, D. O., Akullian, A., Alidina, H., Asari, T., Bassett, H., Beger, M., & others. (2021). Integrate biodiversity targets from local to global. *Science*, 373(6556), 746–748. <https://doi.org/10.1126/science.abj2849>
- Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R., Hornidge, A. K., Le Tissier, M., Pittman, J., Song, A. M., & Sousa, L. P. (2020). Environmental governance theories: Insights from community-based resource management. *Global Environmental Change*, 63, 102123. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102123>
- Schaefer, M., Goldman, E., Bartuska, A. M., Sutton-Grier, A., & Tenhunen, J. (2015). Nature as capital: Advancing and incorporating ecosystem services in United States federal decision-making. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(24), 7389–7396. <https://doi.org/10.1073/pnas.1420508112>

- Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- United Nations, European Commission, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Bank. (2021). *System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA)*. United Nations.
- United Nations. (2021). *The Sustainable Development Goals Report 2021*. United Nations.
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the blue economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1508411>
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	217	72,3
	Perempuan	83	27,7
Usia	18-30 Tahun	54	18,0
	31-40 Tahun	86	28,7
	41-50 Tahun	91	30,3
	> 50 Tahun	69	23,0
Pendidikan	SD/Sederajat	62	20,7
	SMP/Sederajat	71	23,7
	SMA/SMK/Sederajat	116	38,7
	Diploma/Sarjana	51	17,0
Pekerjaan	Nelayan	158	52,7
	Pelaku Usaha Pesisir	47	15,7
	Masyarakat Pesisir	61	20,3
	Pemerintah/Kelompok Masyarakat	34	11,3

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Blue Accounting</i>	300	2,17	5	3,87	0,58
<i>Environmental Awareness</i>	300	2,33	5	4,12	0,51
<i>Stakeholder Engagement</i>	300	2,00	5	3,79	0,63
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	300	2,25	5	3,91	0,55

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 3. Hasil *Outer Loading*

Konstruk	Indikator	<i>Outer Loading</i>
<i>Blue Accounting</i>	X _{1.1}	0,812
	X _{1.2}	0,846
	X _{1.3}	0,831
	X _{1.4}	0,791
	X _{1.5}	0,858
	X _{1.6}	0,823
<i>Environmental Awareness</i>	X _{2.1}	0,794
	X _{2.2}	0,826
	X _{2.3}	0,851
	X _{2.4}	0,838
	X _{2.5}	0,817
	X _{2.6}	0,809
<i>Stakeholder Engagement</i>	X _{3.1}	0,821
	X _{3.2}	0,857
	X _{3.3}	0,844
	X _{3.4}	0,831
	X _{3.5}	0,869
	X _{3.6}	0,823
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	Y1	0,801
	Y2	0,836
	Y3	0,872
	Y4	0,814
	Y5	0,857
	Y6	0,841
	Y7	0,824
	Y8	0,866

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Konstruk

Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	AVE	Keterangan
<i>Blue Accounting</i>	0,913	0,932	0,696	Valid dan reliabel
<i>Environmental Awareness</i>	0,901	0,925	0,674	Valid dan reliabel
<i>Stakeholder Engagement</i>	0,918	0,935	0,704	Valid dan reliabel
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,941	0,951	0,707	Valid dan reliabel

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan

Konstruk	<i>Blue Accounting</i>	<i>Environmental Awareness</i>	<i>Stakeholder Engagement</i>	Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan
<i>Blue Accounting</i>	-	0,712	0,741	0,768
<i>Environmental Awareness</i>	0,712	-	0,783	0,795
<i>Stakeholder Engagement</i>	0,741	0,783	-	0,821
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,768	0,795	0,821	-

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
<i>Blue Accounting</i>	1,784
<i>Environmental Awareness</i>	1,926
<i>Stakeholder Engagement</i>	2,013

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 7. Hasil Uji Model Struktural

Variabel Endogen	R ²	Adjusted R ²
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,672	0,669

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 8. Effect Size (f²)

Hubungan	f ²	Keterangan
<i>Blue Accounting</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,092	Efek kecil
<i>Environmental Awareness</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,126	Efek kecil-Sedang
<i>Stakeholder Engagement</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,214	Efek sedang

Sumber : Data Olah, 2026

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Koefisien (β)	t-statistic	p-value	Keputusan
H1	<i>Blue Accounting</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,286	4,217	0,000	Diterima
H2	<i>Environmental Awareness</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,318	4,856	0,000	Diterima
H3	<i>Stakeholder Engagement</i> → Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	0,391	6,174	0,000	Diterima

Sumber : Data Olah, 2026